

RAPAT KERJA
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR, 7-8 MEI 1991

RLPM - IV

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN IPB
1991 - 1995

Oleh:
PEMBANTU DEKAN I
FAKULTAS PERTANIAN IPB



LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1991

**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN IPB
1991-1995 ¹⁾**

Oleh:

HIDAYAT SYARIEF ²⁾

LATAR BELAKANG

Sumberdaya manusia, bidang keilmuan dan berbagai perangkat yang dikelola oleh lima jurusan yang bernaung pada Fakultas Pertanian merupakan modal dasar bagi penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat (PPM) yang dapat berdayaguna bagi keberhasilan pembangunan pertanian secara holistik. Hasil kegiatan PPM serta temuan permasalahan di lapang dapat diolah lebih lanjut guna menelorkan berbagai gagasan monumental dan masukan bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan. Kegiatan PPM juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna yang berkiprah dalam sektor swasta. Selain itu, program PPM yang diselenggarakan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan dharma pendidikan dan penelitian. Sasaran kegiatan PPM tidak hanya terbatas pada tingkat lokal atau nasional. Berbagai bentuk dan jenis pelatihan sudah mampu kita arahkan kepada kelompok sasaran regional dan internasional.

Kehadiran Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 memberi nuansa baru bagi Fakultas Pertanian dan IPB secara keseluruhan untuk dapat secara mandiri mendaya-gunakan sumberdaya sendiri dalam menyelenggarakan program PPM yang bermanfaat ganda. Mengacu kepada kedua landasan hukum itu, berikut modal dasar yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian IPB perlu dirumuskan jenis dan mekanisme penyelenggaraan PPM yang mampu menciptakan iklim yang kondusif guna merangsang munculnya gagasan-gagasan monumental dan program-program yang aktual dari IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi pertanian yang bergengsi di tingkat nasional dan bahkan di tingkat regional dan internasional. Sistem kelembagaan berikut ketentuan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara nasional masih perlu disempurnakan.

-
- 1) Disampaikan dalam Rapat Kerja Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, tanggal 7-8 Mei 1991.
 - 2) Pembantu Dekan I Fakultas Pertanian IPB

KERANGKA PEMIKIRAN

Kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Indonesia yang bersifat agraris menuntut perlunya pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengisyaratkan bahwa pembangunan nasional akan dikembangkan menuju struktur ekonomi yang seimbang antara sektor industri yang kuat dengan dukungan sektor pertanian yang tangguh. Sejalan dengan itu, pembangunan pertanian diarahkan pada usaha untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penghasilan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pengembangan ekspor komoditas non-migas.

Gagasan monumental yang diciptakan IPB pada awal tahun 1960-an berupa konsep Bimas telah membawa negara kita ke tarap swasembada beras pada tahun 1984. Dalam era pasca-swasembada ini, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian Indonesia. Usaha peningkatan dan pengamanan produksi pangan harus berpacu dengan kenaikan kebutuhan konsumsi sebagai akibat peningkatan penduduk yang masih cukup tinggi yang juga diikuti dengan peningkatan pendapatan dan perubahan pola konsumsi. Penurunan devisa asal minyak bumi menuntut adanya peningkatan ekspor komoditas pertanian guna mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumberdaya pertanian sebagai sumberdaya terpulihkan (renewable resources) yang tersedia secara beragam di tanah air kita mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage) sehingga merupakan alternatif yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu, perlu dirancang berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor pertanian, menjaga dan meningkatkan mutu komoditas, meningkatkan efisiensi produksi sehingga mampu menjawab berbagai tantangan global dengan tetap mempertimbangkan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Disamping itu, pembangunan pertanian harus berperan pula dalam usaha untuk mengurangi beban impor sehingga selain akan mempunyai dampak penghematan devisa, juga akan mengurangi ketergantungan secara ekonomi maupun politik dari negara lain.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, potensi sumberdaya lahan, sumberdaya hayati dan sumberdaya manusia yang cukup besar harus didayagunakan secara optimal dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Kendala teknis yang dihadapi antara lain tingkat kesuburan lahan yang beragam dan distribusi penduduk yang kurang merata antar wilayah menyebabkan potensi lahan yang ada terutama di luar Jawa masih belum didayagunakan secara optimal untuk usaha pertanian. Di lain pihak, lahan pertanian di Jawa semakin menyempit karena desakan tingginya jumlah penduduk dan peningkatan volume pembangunan sektor non pertanian. Lahan-

lahan produktif terpaksa sebagian berubah menjadi tempat permukiman, tapak industri dan pusat perdagangan.

Dalam usaha meningkatkan pendayagunaan potensi sumberdaya pertanian yang tersedia termasuk sumberdaya manusia diperlukan pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi (iptek) di bidang pertanian. Dalam konteks ini pengembangan sumberdaya manusia nampak menduduki tempat yang strategis.

Fenomena menarik dewasa ini dalam konteks pembangunan pertanian sedang berlangsung. Pengembangan dan diversifikasi usaha serta pengembangan manajemen makin tampak ke permukaan. Dengan semakin tingginya kebutuhan akan kecanggihan dan ketepatan usaha pertanian berbagai pelayanan jasa berupa studi kelayakan, evaluasi proyek, perencanaan usaha pertanian, dan analisis dampak lingkungan serta jasa konsultasi dalam berbagai aspek pertanian semakin diperlukan. Kepedulian yang semakin merata akan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat menuntut peran yang lebih besar dari lembaga perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta dalam mengembangkan berbagai program pembangunan masyarakat. Aspek-aspek pembangunan dari bawah, peningkatan pendapatan kelompok miskin, peran wanita serta aspek lingkungan merupakan hal-hal yang semakin dipandang strategis. Sederetan program pemerintah yang menyangkut program pertanian di pinggiran perkotaan, program transmigrasi, pengembangan kelembagaan sosial dan ekonomi pedesaan semakin perlu didukung guna keberhasilannya. Fenomena ini merupakan tantangan bagi Fakultas Pertanian dan unit-unit lainnya di IPB.

Sebagaimana halnya dengan Indonesia, berbagai negara berkembang lain pun menghadapi permasalahan dalam menjalankan proses pembangunannya. Walaupun secara substansial permasalahan yang dihadapi berbeda dengan di negara kita, namun pada prinsipnya setiap negara memerlukan tenaga pembangunan dengan kualitas yang dapat diandalkan. Pengalaman dan modal dasar yang dimiliki Fakultas Pertanian dan IPB secara keseluruhan memungkinkan diselenggarakannya kegiatan pengembangan sumberdaya manusia yang ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang lainnya. Dengan demikian, sasaran kegiatan PPM tidak hanya terbatas pada masyarakat pengguna di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sehubungan dengan semua itu, maka penyelenggaraan dan pengembangan program PPM Fakultas Pertanian perlu dirumuskan dan diselenggarakan yang diarahkan baik untuk menjawab berbagai tantangan nasional maupun regional dan internasional.

T U J U A N

Berangkat dari kerangka pemikiran sebagaimana dibahas tersebut di atas, program pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian IPB mempunyai tujuan umum terciptanya kondisi yang

mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan. Dalam konteks regional dan internasional, program PPM ditujukan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi regional dan internasional dalam rangka mewujudkan keragaan sistem pertanian yang lebih mantap secara global.

Tujuan khusus program PPM Fakultas Pertanian IPB antara lain:

- a. Membantu penyediaan tenaga profesional dalam berbagai bidang pertanian yang diperlukan oleh masyarakat pengguna baik instansi pemerintah maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
- b. Menyediakan layanan berupa informasi dan penyuluhan atau konsultasi dalam berbagai aspek pertanian bagi masyarakat pengguna khususnya yang berkiprah secara langsung di lapangan.
- c. Membantu terciptanya iklim yang kondusif bagi masyarakat pertanian di pedesaan guna meningkatkan peransertanya dalam pembangunan pertanian berdasarkan prinsip pendekatan membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri (to help the people to help themselves) dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya.
- d. Menciptakan iklim yang kondusif bagi para staf agar lebih terangsang melaksanakan kegiatan PPM.

RANCANGAN PROGRAM

Mengacu kepada tujuan dan sumberdaya Fakultas Pertanian IPB dan guna menjawab berbagai tantangan pembangunan pertanian dalam era globalisasi dewasa ini program PPM Fakultas Pertanian dirancang sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelatihan singkat (short term training) bagi para pelaku pembangunan pertanian dalam berbagai bidang seperti pertamanan, pengelolaan gulma, penanggulangan hama terpadu, konservasi tanah, monitoring dan evaluasi proyek, manajemen agribisnis, koperasi, peranan wanita, pemanfaatan pekarangan, dan perencanaan pangan dan gizi masyarakat.
2. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelayanan jasa konsultasi.
3. Penyelenggaraan pelatihan regional atau internasional.
4. Pengembangan desa mitra kerja dengan melibatkan mahasiswa dan dosen junior.
5. Penerbitan alat bantu pandang-dengar (audio visual aids) untuk penyuluhan pertanian.

Sesuai dengan substansi dan tujuannya program PPM tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran baik institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta

yang berkiprah sebagai perencana maupun pelaksana program dan usaha pertanian. Cakupan sasaran program tidak terbatas pada tingkat lokal atau nasional, tetapi juga pada tingkat regional dan bahkan internasional.

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

Dalam menyelenggarakan PPM digunakan prinsip kelembagaan sebagai berikut :

1. Jurusan sebagai institusi pelaksana program dirangsang untuk kegiatan pengabdian sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.
2. Kerjasama antar jurusan digalang melalui penyelenggaraan program lintas disiplin.
3. Setiap penyelenggaraan program PPM dilakukan secara melembaga melalui Fakultas bekerjasama dengan LPM IPB.
4. Kegiatan PPM dilaksanakan dengan tetap mempertahankan keseimbangan kegiatan tridharma secara institusi.
5. Bagi individu masih perlu dirumuskan sistem berikut ketentuan yang kondusif agar kegiatan PPM lebih merangsang staf pengajar. Hal ini menyangkut sistem kredit (kum) yang berlaku secara nasional.